

**KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEDAGANG PANTAI PESONA
(KP3) RUPAT UTARA OLEH DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS**

By: Widya Tri Andhini

Email : widya3andhini@gmail.com

Counsellor: Dr. Yasir M.Si

*Major of Communication Science – Public Relation
Faculty of Social Political Science
Campus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63272*

ABSTRACT

Communication process is one of defining factor in the success of empowerment the community. The planned program should distribute well. Therefore empowerment communication becomes a trend in managing the community to increase their standard of living especially for the community which far for receiving any information but still in the “circle” of extraordinary natural potential. The purpose of this research is to know communication of empowerment, participation and obstacles happen to PantaiPesona Merchant Group of North Rupert by Culture, Tourism, Youth and Sport Affair of Bengkalis Regency.

Model of the empowerment communication with democratic leadership has applied in this research to measure the communication of empowerment. The research used qualitative method through descriptive analysis which refers to Huberman and Miles data model systematic analysis. Subject in this research are tanjung Medan’s headman, Tanjung Medan’s Companion Village, and the members of PantaiPesona Merchants’ group (KP3) North Rupert.

The result of this research indicates the efforts empowerment communication for the group development has run well. Generally, the patterns that showed up in the communication model above have been run well. It is just some sustaining success factors of this program not yet implemented maximally such as : the government hasn’t maximally identifying social community, the empowerment hasn’t done regularly and periodically, and the parties involved in managing KP3RU hasn’t have good capacity and capability.

Keywords: empowerment communications, empowerment the community.

PENDAHULUAN

Riau sebagian wilayahnya adalah kawasan pesisir yang memiliki garis pantai $\pm 1.200 \text{ KM}^2$ (Sumber: Pekanbaru.tribunenews.com edisi 28 Januari 2015 diakses tanggal 4 februari 2016). Memiliki potensi wisata unggulan berupa pantai, hutan laut, hasil tangkapan laut, biota laut, pulau, produk kerajinan tangan, kuliner, dan sebagainya. Propinsi Riau memiliki 6 (enam) kabupaten/kota yang berada di kawasan pesisir pantai. Diantaranya meliputi Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kep. Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Keseluruhan kawasan ini berada dijalur perairan internasional Selat Malaka dan berhadapan langsung dengan semenanjung Malaysia. Jika dilihat dari keberadaannya, tentunya Riau memiliki tantangan besar dalam pergelutan MEA. Namun potensi pariwisata yang ada di 6 (enam) kabupaten di atas dinilai belum mampu membantu perekonomian masyarakat setempat.

Saat ini KP3RU menjadi subjek yang cukup penting dalam proses pembangunan berkelanjutan. Di dalam proses pembangunan, KP3RU adalah kelompok masyarakat yang paling sering bersentuhan atau berkomunikasi dengan para wisatawan. Menurut dugaan peneliti banyak hal yang telah dikomunikasikan. Mulai dari persoalan-persoalan umum hingga persoalan keadaan dan saran pengembangan kawasan pantai kedepannya.

KP3RU merupakan kelompok pedagang yang dibentuk oleh pihak desa untuk menciptakan keteraturan bagi para pedagang yang ada di kawasan Pantai Pesona Rupert Utara. Keteraturan tersebut ditujukan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar pedagang. Anggota KP3RU ini mayoritas “dihuni” oleh ibu-ibu

sebagai wadah untuk membantu perekonomian keluarga.

Mengingat kelompok ini, yang kerap berkomunikasi dengan parawisatawan maka wajar kiranya kelompok ini dinilai memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan wisatawan dalam aspek konsep dan jenis suguhan wisata lainnya selain objek pantai.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis juga pada tahun 2012 membentuk KP3RU ini sebagai sebuah upaya promosi pariwisata di Kabupaten Bengkalis. Berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis terhadap kelompok ini. Namun kondisi yang berlaku saat ini dalam pantauan peneliti juga masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Berhasil atau tidaknya suatu program pemberdayaan pedagang ini, dapat dilihat apakah pedagang ikut atau tidak dalam mekanisme program yang sudah disampaikan. Biasanya, mekanisme program yang dibuat sudah melalui uji kelayakan dan studi yang matang. Dan jika mekanisme tersebut, sangat dimungkinkan tingkat keberhasilan akan tinggi. Namun berdasarkan wawancara awal terhadap beberapa orang yang pernah mengunjungi pantai Pesona Rupert Utara dan melakukan transaksi pembelian di beberapa gerai pedagang, masih ada yang mengeluh.

Komunikasi pembangunan

Komunikasi Pembangunan hadir sebagai sebuah studi komprehensif yang secara konseptual bersumber dari teori komunikasi dan teori pembangunan yang saling menopang dalam rangka mempercepat dan menuntaskan permasalahan pembangunan. Studi

komunikasi pembangunan menjadi kajian populer di negara dunia ketiga dimana studi ini dalam bingkai teoritis dikembangkan melalui kajian dan analisis mendalam yang diarahkan pada upaya pencarian konsep atau model pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang akan menuntun jalan bagi munculnya kesadaran baru dengan konsep-konsep yang bersifat korektif.

Disinyalir menjadikan keadaan semakin memburuk dengan dinikmatinya hasil pembangunan oleh segelintir kelompok elit saja. Kegagalan modernisasi yang baru saja disebut merupakan bagian dari apa yang dikemukakan oleh teori dependensi, sebagai kritik kelemahan teori modernisasi yang merupakan wajah dari paradigma dominan pembangunan. Hadir sebagai paradigma kritis, teori dependensi menjelaskan bahwa pembangunan dengan paradigma modernisasi menjadikan negara-negara berkembang (dunia ketiga) memiliki ketergantungan yang kuat terhadap negara-negara maju, sehingga menjadi tidak berdaya dan semakin terbelakang.

Dengan demikian, konsep komunikasi pembangunan merupakan usaha pemilihan strategi dan model komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan, mengkaji, dan menjelaskan tentang suatu isu, ide, atau gagasan ideal yang berkaitan dengan perubahan menuju pembangunan masyarakat yang akan memberikan inspirasi segar dalam penggalian kreativitas, kepentingan, aspirasi, dan kebutuhan individu, kelompok, dan masyarakat dan diharapkan akan bermunculan ide, gagasan dan inovasi dari kalangan akar rumput (*grassroots*) (Dilla, 2007:59).

Komunikasi Pemberdayaan

Pemberdayaan harus berperan untuk mewujudkan konsep masyarakat belajar

atau *Concept of Societal Learning* dan caranya adalah dengan mempertemukan *top down approach* dengan *bottom-up approach* yang pada dasarnya adalah “kontradiktif” (Friedmann dalam Burke, 2004: 238). Kedua macam pendekatan ini kontradiktif karena masyarakat dan perencana sangat sering memiliki pemahaman masalah, perumusan, tujuan dan ide-ide pemecahan praktis yang berbeda akibat menganganya jurang pengetahuan dan komunikasi antara perencana dengan masyarakat.

Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat

Komunikasi pemberdayaan masyarakat (KPM) merupakan entitas yang tidak dapat terlepas dari komunikasi pembangunan (KP). KPM merupakan salah satu strategi pembangunan yang mengedepankan pembangunan yang terpusat pada manusianya (*people-centered*), pengoptimalan partisipasi masyarakat, dan komunikasi dialogis yang berlangsung dua arah.

Maka, komunikasi pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya pembebasan dan pencerahan untuk meningkatkan harkat, martabat, serta menanamkan jiwa kemandirian masyarakat sehingga seluruh aktivitas pembangunan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Proses perubahan tersebut berlangsung secara alamiah dengan asumsi bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pelaku-pelaku sosial yang ikut dalam proses perubahan tersebut.

Komunikasi Pemberdayaan Kelompok Pedagog

Kelompok Pedagog Pantai Pesona (KP3) Rupert Utara pada hakekatnya

adalah upaya pemberdayaan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis. Upaya ini menekankan pada penerapan, pelaksanaan, penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat di tingkat lokal berdasar prinsip pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Pedagang Pantai Pesona (KP3) Rupa Utara mengutamakan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh masyarakat secara langsung dan terpadu dalam wadah kelembagaan-kelembagaan lokal yang dikoordinasikan oleh lembaga lokal baik desa, kecamatan dan tingkatan di atasnya.

Pemberdayaan yang akan dilakukan memerlukan langkah-langkah yang riil dalam penanganannya. Langkah-langkah yang diambil dalam mewujudkan tujuan adalah melalui:

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satu kelompok/antar kelompok. Dengan demikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konsep partisipasi dan tiap partisipasi.

Pembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yang berwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstual sehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh perencanaan makro.

Pembangunan partisipatif juga mempertemukan pendekatan dari atas (top-down), dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atas dan pendekatan dari bawah (bottom-up), yang menekankan keputusan di tangan masyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing. Dalam pembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yang terlibat.

Cohen dan Uphof, dalam Komarudin, (1997:139) dalam partisipasi

masyarakat dikenal adanya tipe partisipasi, modus partisipasi dan siklus partisipasi, yaitu Tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Hall (1986:117) partisipasi masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang memandang masyarakat dalam konteks dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan, kemampuan dan aspirasi yang dimiliki, baik secara individu maupun komunal.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Komunikasi Pemberdayaan

Pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis. Upaya ini menekankan pada penerapan, pelaksanaan, penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat di tingkat lokal berdasar prinsip pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Pedagang Pantai Pesona (KP3) Rupa Utara mengutamakan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh masyarakat secara langsung dan terpadu dalam wadah kelembagaan-kelembagaan lokal yang dikoordinasikan oleh lembaga lokal baik desa, kecamatan dan tingkatan di atasnya.

Sasaran Program yang mengarah pada penduduk miskin dan perempuan yang kebanyakan menganggur menyebabkan mereka sadar, yakin dan percaya diri untuk dapat berusaha. Dengan begitu, maka mereka akan berusaha menampilkan apa yang dapat diperbuat dan diusahakan dan nantinya dapat dikerjakan bersama. Salah satunya adalah berdagang di kawasan Pantai Pesona Rupa Utara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi para wisatawan.

Keseluruhan data hasil penelitian dibawah ini merupakan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan. Data-data yang ditampilkan sudah mengikuti kaedah triangulasi data, dimana data-data yang ada sudah melalui proses pemilihan dan pemilahan berdasarkan kebutuhan penelitian.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan kasi Pengembangan Objek Wisata, sebagai berikut:

“Pemberdayaan sudah beberapa kali dilakukan tidak hanya dari Disbudparpora, tetapi juga dari dinas lain, totalnya berapa kali saya tidak tahu pastinya, tetapi setiap ada program atau pelatihan kami selalu diundang untuk menghadiri, pemberdayaan ini dilakukan tidak hanya untuk program pemerintah yang harus dilaksanakan, tetapi juga untuk masyarakat agar bisa berkomunikasi yang baik dengan pelanggan, menciptakan hal-hal baru, dan memberi pengetahuan baru yang mungkin mereka belum menerimanya, program ini tidak akan berhenti sampai disini, kami akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat nantinya untuk mereka, baik itu kegiatan formal maupun informal, agar nantinya pemerintah dekat dan akrab dengan mereka.” (wawancara: Kasi Pengembangan Objek Wisata: Mukhtariyadi)

Seperti yang sudah di tuturkan informan bahwa pemberdayaan sudah beberapa kali dilakukan tidak hanya dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga saja tetapi juga dari pemerintah lain, misalnya badan ketahanan pangan dan Penyuluhan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah dan lain-lainnya. Kegiatan ini dilakukan bukan hanya untuk memberi pelatihan dan pengetahuan baru, tetapi juga untuk membangun tali silaturahmi.

Peran Pendamping

Selaku pemerintah yang melakukan pendampingan baik terhadap masyarakat maupun terhadap program tentunya akan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Apalagi setiap unsur pemerintah yang ada memiliki tugas dan wewenang tertentu sehingga ketika ini dipahami oleh masyarakat, maka peran yang dimiliki sesebuah instansi tidak akan keluar dari wewenang yang ada.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Pendamping Desa terkait peran pendamping, sebagai berikut :

“Kalau saya sebagai pendamping desa, tentu sifatnya adalah mendampingi

setiap program yang dijalankan dan dikembangkan di desa ini. Selama ini menurut hemat saya saya telah menjalankannya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh koordinator pendamping desa dari kecamatan. Buktinya hampir setiap saat kita melakukan konsolidasi dengan masyarakat baik pengurus maupun anggota terhadap jalannya program KP3RU ini. (Wawancara dengan Pendamping Desa : Ismail Marzuki, M.Soc.Sc)

Disini pendamping desa sudah menjalankan perannya dengan baik misalnya pendamping desa sudah sering melakukan konsolidasi dengan masyarakat baik itu pengurus maupun anggota, demi kelancaran program kelompok pedagang pantai Pesona Rupa Utara.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota kelompok pedagang pantai pesona Rupa Utara terkait peran pemerintah Pendamping, sebagai berikut :

“Mereka selalu berbual dengan kami, kadang-kadang petang hari orang tu datang jumpe kami sekedar bincang-bincang tentang persoalan ape yang kami hadapi. Kalau menurut saya mereka cukup berperan dan tugas mereka sebagai pendamping kami bagus tak ade masalah,.....”. (Wawancara : Bpk. Edi Sunawir)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendamping desa, mendampingi setiap program yang dijalankan dan dikembangkan di desa Teluk Rhu. Keluhan-keluhan terkait system tata kelola sudah diatasi bersama, sehingga mendapatkan pembinaan secara berkala. Dan menurut beberapa pedagang, pemerintah dan pendamping sudah banyak berperan aktif didalam program ini. Komunikasi antara anggota kelompok dengan pemerintah dikenal baik dan akrab.

Nilai Individual yang Dikembangkan Dalam Kelompok

Maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh setiap individu yang

kemudian dikonsinyasikan didalam kebiasaan kelompok. Tujuannya adalah untuk mengakomodir semua kepentingan agar roda kelompok berjalan sesuai kehendak dan target bersama.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terkait nilai individual yang dikembangkan dalam kelompok, sebagai berikut :

“Selaku pendamping desa, kami selalu berpesan bahwa kemajuan kelompok adalah kemajuan bersama. Jadi nilai-nilai yang kami kembangkan dalam kelompok ini adalah nilai kelompok. Sedangkan kepada masing-masing individu kami selalu menekankan bahwa semua anggota adalah ibarat saudara kandung, sehingga tidak ada yang saling menjatuhkan. Dan pesan ini yang senantiasa kami tanamkan terhadap anggota yang berdagang dilapangan. Sebab adek tau sendirikan cara orang kite bedagang dibanding yang lain. Apa lagi kalau melihat dagangan tetangga ramai, sudahlah tu.... hahahaha (Wawancara dengan Pendamping Desa : Ismail Marzuki, M.Soc.Sc)

yang diinginkan setiap masyarakat sosial guna membentuk tali kasih dan keakraban yang erat. Agar tidak adanya saling menjatuhkan dan iri hati dalam setiap langkah hidup.

“Syukur alhamdulillah dek... ternyata dengan berdagang yang dikembangkan oleh pengurus desa ni, kami merasa bedagang lebih sedap. Semase dulu belum ada kelompok ni, masing-masing saling menjatuhkan”. (Wawancara : Ibu Sri Untari)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa nilai individual yang dikembangkan didalam kelompok sudah diterapkan, misalnya semasa dahulu sebelum dibentuknya kelompok pedagang ini, masing-masing pedagang menjatuhkan satu sama lain, saling iri, dan jarang bertegur sapa. Akan tetapi setelah terbentuknya kelompok ini, para anggota kelompok sekarang sering berkomunikasi, saling bertukar pikiran, dan saling memberikan masukan satu sama lain.

Partisipasi Masyarakat

Mengacu pada hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, partisipasi masyarakat yang terjadi adalah partisipasi positif. Artinya keikutsertaan masyarakat terhadap program yang dijalankan bukan hanya sekedar ikut, akan tetapi diiringi dengan kepatuhan terhadap segala sesuatu yang telah ditetapkan secara bersama.

Hal ini tergambar pada wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suharman, antara lain:

“Sejauh ini aman je dek... tak ade masalah. Sebab aturan dalam kelompok ni dah kite sepakati. Jadi kalau ade yang melanggar maknenye di tak paham dengan ape yang die ie kan dulu mase penyusunan kelompok ni”. Bapak pun sejak ikut kelompok ni tiap bulan penghasilan naik, tak pernah ade masalah, tak pernah iri-iri dengan hasil tetangga. Alhamdulillah semuene cukup dan mudah diatur” (Wawancara : Bpk. Suharman)

Dari hasil wawancara diatas dengan bapak Suharman bahwa sudah ada perubahan dari dulu sebelum. Menurut pendamping desa, kemajuan kelompok yang dikembangkan oleh pihak desa. Dan keikutsertaan masyarakat didalamnya pun sudah cukup meningkat untuk tergabung dalam kelompok pedagang pantai pesona rupa utara dari tahun ketahunya. Tidak hanya pendamping desa yang informan ada perkembangan yang cukup signifikan misalnya yang dahulunya saling menjatuhkan antar sesama pedagang dan kemudian penghasilan ada peningkatan setiap bulannya.

Partisipasi dalam Komunikasi Kelompok

Partisipasi dalam Musyawarah Pengurus

Partisipasi masyarakat atau unit kelompok masyarakat dalam kegiatan musyawarah sangat perlu dilakukan. Meningkatkan dalam kegiatan tersebut, akan membicarakan dan memutuskan terkait persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dan masyarakat atau anggota kelompok tersebutlah yang benar-benar memahami setiap persoalan yang ada. Bahkan ditataran aplikatif lapangan mereka merupakan pihak yang terlibat langsung.

Begitu juga halnya dengan KP3RU ini, karena sebagai anggota masyarakat yang langsung bersentuhan dengan konsumen maka mereka perlu dilibatkan dalam setiap musyawarah agar dinamika yang muncul dapat tersampaikan dalam forum dan diselesaikan secara baik.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan terkait partisipasi mereka dalam musyawarah pengurus, sebagai berikut :

“Kami secara pribadi memang tak pernah dilibatkan dalam musyawarah pengurus, sebab saya bukan pengurus dalam KP3RU ini. Saya hanya anggota biasa”. (Wawancara : Bpk. Suharman)

“Hahahaha.... macam orang penting pulak rapat-rapat tu dek. Ibuk ni paling malas kalau ade rapat. Ibuk tak pernah datang. Lagipun yang wajib datang tu pengurus. Ibuk tak masuk dalam kepengurusan...” (Wawancara : Ibu Jaminah)

Tidak sedikit anggota kelompok yang beranggapan bahwa ia tidak dibutuhkan saat musyawarah pengurus, akan tetapi banyak ilmu yang harusnya ia dapatkan serta informasi-informasi terbaru didalam musyawarah kepengurusan. Akan tetapi masih ada beberapa anggota kelompok yang ikut hadir.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pengurus kelompok pedagang pantai pesona Rupa Utara, sebagai berikut:

“Kalau saye ikut... sebab saye juga bagian dari pengurus. (Wawancara : Bpk. Edi Sunawir)

Hanya bagian kepengurusan saja yang ikut andil dalam musyawarah pengurus, seharusnya semua anggota kelompok harus ambil andil didalamnya karena selain mendapatkan informasi terbaru, ia akan mudah mengerti bagaimana cara kerja program kelompok, tidak hanya mendapat informasi dari satu pihak yang belum tentu akurat, melainkan mendapatkan informasi dari beberapa pihak atau secara langsung.

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat dibutuhkan, karena sifatnya untuk bersama, pengambilan keputusan merupakan suatu cara menghindari masalah, mempertibangkan masalah, serta

mencari solusi dari masalah tersebut. Secara umum masyarakat perlu dilibatkan yaitu masyarakat memiliki hak untuk di libatkan, dan pembangunan lebih partisipatif jika masyarakat ikut ambil andil di dalamnya.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan terkait Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan, sebagai berikut:

“Kalau pengambilan keputusan memanglah tak ikut secara langsung, tetapi biasanya sebelum pengurus mengambil keputusan kami dimintai masukan kira-kira apa kebutuhan atau masukan dari kami selaku anggota”. (Wawancara : Bpk. Suharman)

Mengingat jawaban yang disampaikan sama, maka peneliti tidak lagi mencantumkan hasil wawancara dengan ketiga informan lainnya.

Dalam partisipasi pengambilan keputusan sangat dibutuhkan dalam musyawarah antar sesama anggota kelompok dan didalam pengambilan keputusan ini sebagian besar anggota kelompok dimintai masukan oleh pengurus. Misalnya, masukan tentang kebutuhan, fasilitas, voting kepengurusan dan lain-lain.

Partisipasi dalam Evaluasi

Bukan hanya dalam musyawarah, setiap hasil keputusan musyawarah yang sudah dijalankan, maka pihak-pihak yang terlibat perlu dilibatkan dalam proses evaluasi kebijakan. Mereka akan menjadi orang yang paling tahu apakah kebijakan yang diambil tersebut menjadi solusi dari persoalan yang ada atau justru memperkeruh keadaan.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan terkait Partisipasi dalam Evaluasi, sebagai berikut :

“Kalau evaluasi, kami merasa belum pernah dilakukan sejauh ini. Mungkin pengurus merasa kami tak ada keluhan.. maka tak ada persoalan yang perlu dicari jalan keluar.... (Wawancara : Bpk. Suharman)

“Evaluasi.....??? Apa tu dek...??? Bapak rase tak pernahlah.... (Wawancara : Bpk. Edi Sunawir)

Mengingat jawaban yang disampaikan sama, maka peneliti tidak lagi mencantumkan hasil wawancara dengan kedua informan lainnya.

Evaluasi untuk saat ini belum pernah dilakukan karena tidak adanya keluhan-keluhan dalam anggota kelompok yang memerlukan jalan keluar dari persoalan mereka. Sehingga jika mereka mempunyai persoalan maka akan langsung bertanya oleh pendamping desa selaku Pembina anggota kelompok.

Partisipasi dalam teknis pelaksanaan Kegiatan

masyarakat atau kelompok masyarakat perlu menjadi target sasaran pelaksanaan setiap kegiatan yang direncanakan. Terutama dalam program-program pemberdayaan masyarakat, maka masyarakatlah pihak yang berhak untuk ikut serta dan terlibat aktif didalamnya.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan terkait Partisipasi dalam teknis pelaksanaan Kegiatan, sebagai berikut :

“Kalau dalam kegiatan teknis kami dilibatkan dek.... misalnya kegiatan pelatihan melayani pelanggan, cara berbual dengan pelanggan.. langsung praktek kami” (Wawancara : Bpk. Suharman)

“Untuk kegiatan yang sifatnya teknis, kami ikut... sebab ini wajib kata pengurus. Lewat kegiatan teknis inilah kami dilatih macam mana nak buat pelanggan tetap belanje dan merasa puas ditempat kami ni.bahkan kami yang ibu-ibu dilatih bagaimana nak membuat masakan dengan cita rasa khas melayu cuman masuk dalam selera orang selain melayu”. (Wawancara : Ibu Jaminah)

Teknis pelaksanaan kegiatan saat ini sejauh ini sudah sering dilakukan, terkadang tidak hanya dari Pemerintah saja tetapi antar sesama anggota kelompok juga sering saling berbagi. Misalnya, berbagi informasi seputar resep masakan, kepengurusan anggota kelompok pedagang, melayani pelanggan dan lain-lain.

Partisipasi dalam pengadaan Bahan Baku pengembangan dan pemberdayaan kelompok

Dalam konteks ini, kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, hanya masyarakat yang bersangkutan yang tahu. Sedangkan pihak luar sifatnya adalah memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang bakalan muncul. Apalagi terkait keterlibatan pengadaan bahan baku, dalam banyak program ada banyak pilihan yang tersedia. Namun tidak semua spesifikasi dapat dipergunakan dalam sebuah situasi masyarakat tertentu. Maka dari itu Partisipasi dalam pengadaan Bahan Baku pengembangan dan pemberdayaan kelompok perlu dilakukan.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan terkait Partisipasi dalam pengadaan Bahan Baku pengembangan dan pemberdayaan kelompok, sebagai berikut :

“Tak pernah dek.... soalnya kalau ade kagiatan pembinaan dan pelatihan... kami tinggal datang dan ikut pelatihan. Segala bentuk bahan ke bahan dah disiap dek pengurus semuanya”. (Wawancara : Ibu Sri Untari)

“Kalau ibuk ingat, rasenye pernah bahan baku yang dibawa sendiri. Misalnya pas pelatihan memasak kemarin, ada beberapa bahan dasar yang diminta bawak sendiri contohnye pisau, batu giling, pena, kertas... sedangkan bumbu dan bahan lainnya disiapkan pengurus”. (Wawancara : Ibu Jaminah)

Pengadaan bahan baku pengembangan dan pemberdayaan kelompok sudah disiapkan oleh pemerintah ketika kegiatan pembinaan dan pelatihan dilakukan segala bentuk bahan sudah disiapkan oleh pengurus. Namun, ada beberapa bahan dasar yang dimintai membawa sendiri bahanya. Misalnya, fasilitas yang diperlukan saat pembinaan dan pelatihan dilakukan. Sedangkan bahan baku lainnya sudah disiapkan pengurus.

Acara di buat sedemikian rupa agar masyarakat antusias untuk berpartisipasi di dalamnya. Selain fasilitas yang sudah di siapkan, Pemerintah menyiapkan hidangan untuk disantap bersama dengan masyarakat

guna mempererat keakraban dan menjalin silaturahmi.

Partisipasi dalam pelatihan maupun diajarkan secara berkala terkait pengelolaan keuangan kelompok

Dimaksudkan sebagai upaya pihak terkait kepada masyarakat agar para kelompok atau anggota kelompok mampu melakukan pengelolaan keuangan secara baik dan benar. Karena terkait keuangan ini sangat mempengaruhi perkembangan program kemasyarakatan secara berkelanjutan.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan terkait Partisipasi dalam pelatihan maupun diajarkan secara berkala terkait pengelolaan keuangan kelompok, sebagai berikut :

“saya mendapatkan pelatihan dari pendamping desa yang bekerjasama dengan KP3RU... dulu sering dalam dua bulan atau tiga bulan sekali. cuman itukan sebetulnya untuk pengurus... tapi kami boleh ikut. (Wawancara : Ibu Jaminah)

“Saye tak pernah ikut.... sebab kate orang tu yang paling penting ikut tu adalah pengurus... sedangkan saye kan bukan pengurus.... kalau masalah orang tu macam mana nak kelola keuangan kolompok saye percaye saje. Sebab kalau ade yang tak betol pasti yang lain dah menggugat”. (Wawancara : Ibu Sri Untari)

“Kalau saya mengikuti sampai tuntas.... meskipun bukan anggota paling tidak kita ade pengetahuan mengenai itu”. (Wawancara : Bpk. Suharman)

Ada beberapa anggota kelompok yang mendapatkan pelatihan yang diajarkan segala berkala terkait pengelolaan keuangan kelompok, namun sebagian kecil dari mereka masih enggan untuk tergabung didalamnya. Akan tetapi, pelatihan ini penting untuk diketahui Karena mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan kelompok secara langsung.

Partisipasi dalam sistem tata kelola tugas dan wewenang secara berkala

Dimaksudkan agar masyarakat atau anggota kelompok paham dan mengerti sejauh mana tugas dan wewenang yang harus diembannya. Jika ini tidak dilakukan maka selalunya akan terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang antar sesama anggota kelompok atau masyarakat.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan terkait Partisipasi dalam sistem tata kelola tugas dan wewenang secara berkala, sebagai berikut :

”Alhamdulillah lah dek... meskipun bapak ini tak tinggi sekolah.... tapi mengenai macam mana nak mengelola usaha tu sedikit banyak tau juga. Ya... berkat pemberdayaan yang dilakukan terhadap pengurus, tapi siapa pun diizinkan untuk ikut serta. Jadi pengalaman liat orang buat usaha dilapangan, dapat pula ilmunya dari pelatihan” (Wawancara : Bpk. Suharman)

Sistem tata kelola dan wewenang sudah dilakukan secara berkala terkait partisipasi ini sebagian besar anggota sedikit banyak sudah tahu cara mengelola usaha, ini menjadi pengalaman untuk membuat usaha dilapangan. Mereka mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru, mungkin tanpa adanya pelatihan tersebut mereka mengelola gerai secara *otodidak*.

Partisipasi dalam sistem bagi hasil atau sistem upah

Dimaksudkan agar anggota kelompok yang menggunakan pekerja memahami bagaimana pola sistem upah atau bagi hasil dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama. Ini ditujukan agar kebijakan yang diambil tidak melanggar aturan atau ketentuan sesuai peraturan yang ada.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan terkait Partisipasi dalam sistem bagi hasil atau sistem upah, sebagai berikut :

“Kalau untuk sistem upah, memang kami ikut dalam seminar atau pelatihan tu. Tapi setakat tau je lah... sebab kami tak pakai orang keje (pembantu)... kami layan sorang di kedai tu (Wawancara : Ibu Jaminah)

Mengingat jawaban yang disampaikan sama, maka peneliti tidak lagi mencantumkan hasil wawancara dengan ketiga informan lainnya.

Beberapa anggota kelompok sudah tahu bagaimana cara sistem bagi hasil atau sistem upah. Tetapi sebagian besar mereka tidak mempunyai karyawan. Jadi mereka menganggap bahwa sistem bagi hasil ini tidak perlu dilakukan.

Partisipasi dalam pendidikan ataupun pelatihan terkait sistematika atau teknik pembuatan laporan kegiatan

Dimaksudkan agar anggota kelompok memahami dan tahu tentang arti penting pelaporan baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Tertib laporan ini sangat menunjang keberlanjutan program pemberdayaan yang ada dan menghindari kelompok dari hambatan komunikasi kedepannya.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa Partisipasi dalam pendidikan ataupun pelatihan terkait sistematika atau teknik pembuatan laporan kegiatan, sebagai berikut :

“Same jugak dengan pertanyaan adek tadi.... kami ikut dan dapat ilmune tapi kami tak buat. Sebab yang buat laporan tu pengurus untuk dilaporkan ke pendamping dan kepala desa. Tapi kalau disuruh buat kami paham jugak lah sikit-sikit. (Wawancara : Bpk. Edi Sunawir)

Mengingat jawaban yang disampaikan sama, maka peneliti tidak lagi mencantumkan hasil wawancara dengan ketiga responden lainnya.

Sebagian besar anggota kelompok sudah paham tahu cara teknik pembuatan laporan kegiatan. Mereka mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Namun, pembuatan laporan itu hanya pengurus yang membuatnya untuk dilaporkan ke pendamping dan kepala desa.

Partisipasi dalam pendidikan ataupun pelatihan terkait sistematika atau teknik pembuatan laporan administrasi kelompok

Adalah agar dalam sistem pelaporan menerapkan pola atau sistematika yang sesuai dengan aturan atau konsep yang disepakati.

Tujuannya adalah untuk memudahkan anggota dalam memahami pelaporan yang disampaikan karena disampaikan dalam satu jenis format yang sama.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa Partisipasi dalam pendidikan ataupun pelatihan terkait sistematika atau teknik pembuatan laporan administrasi kelompok, sebagai berikut :

“hahahahaha.... same lagi dek....dek.... sama jawaban kami macam tadi” (Wawancara : Bpk. Edi Sunawir)

Sistematika atau teknik pembuatan laporan administrasi kelompok sudah diterapkan. Namun, secara sistematis hanya pengurus yang membuat akan tetapi sebagian besar anggota kelompok sudah memahami dan mengerti cara pembuatan laporan administrasi kelompok.

Aturan dan Norma Kelompok

Aturan dan norma kelompok adalah nilai-nilai yang dikandung dan dijalankan oleh anggota kelompok agar dalam aplikasi dilapangan tidak terjadi benturan komunikasi. Ini biasanya dilakukan untuk menjaga keteraturan hubungan antar anggota kelompok. Aturan dan norma yang ada merupakan hasil kesepakatan anggota kelompok melalui kegiatan musyawarah yang telah dijalankan.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap Aturan dan Norma Kelompok, sebagai berikut :

“Berkaitan dengan aturan dan norma kelompok yang ada, maka kami membuatnya berdasarkan konsep yang disampaikan oleh pemerintah, kemudian kami kolaborasikan dengan aturan dan norma yang disepakati oleh masyarakat. Jadi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah yang kami temui akibat ketidakcocokan atas norma dan aturan KP3RU yang kami jalankan”. (Wawancara dengan Pendamping Desa : Ismail Marzuki, M.Soc.Sc)

Sejauh ini aturan dan norma di dalam kelompok sudah dibentuk, menurut dengan aturan dan norma yang sudah di kolaborasikan

antara konsep yang di buat pemerintah dan norma yang sudah di sepakati oleh masyarakat, dan sampai sekarang belum ada masalah yang di temui akibat tidak cocoknya aturan dan norma yang sudah di jalankan, pemerintah berharap untuk kedepannya aturan dan norma yang di jalankan terus seperti sekarang ini, di jalan kan dengan baik, dan masyarakat mematuhi.

Peraturan yang di jalankan saat ini sudah terkendali dan aman, itu di tuturkan sendiri oleh salah satu anggota kelompok pedagang berikut wawancaranya:

“Sejauh ini aman je dek... tak ade masalah. Sebab aturan dalam kelompok ni dah kite sepakati. Jadi kalau ade yang melanggar maknenye die tak paham dengan ape yang die ie kan dulu mase penyusunan kelompok ni”. ” (Wawancara : Bpk. Suharman)

Berdasarkan wawancara yang disampaikan untuk saat ini aturan tidak ada yang melanggar, apabila ia melanggar artinya ia tidak paham dengan aturan dan norma yang ia sepakati sendiri. Sebelum aturan dan norma di setuju, kelompok pedagang diberikan terlebih dahulu konsep aturan dan norma yang ingin di terapkan, lalu di musyawarahkan dan di sepakati bersama dengan masyarakat.

Kendala Yang dihadapi

Dalam menjalankan programnya, Kelompok Pedagang Pantai Pesona (KP3) Rupa Utara sampai saat ini bukan tanpa halangan. Banyak hal-hal yang dapat menghambat perkembangan dan pengembangan kelompoknya. Beberapa kendala yang dipaparkan dibawah ini adalah hanya kendala-kendala yang terjadi dalam komunikasi pemberdayaan saja, tanpa menyentuh area lainnya seperti infrastruktur dan lain sebagainya. Diantara kendala yang dimaksud adalah :

Sumber Daya Manusia

Pengertian sumber daya manusia dan penerapannya sering kali masih belum sejalan dengan keinginan organisasi. Sementara keselarasan dalam mengelola sumber daya manusia menjadi faktor utama kesuksesan jalannya sebuah organisasi.

Sumber daya manusia terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. Sumber daya manusia atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif Sumber daya manusia, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolak ukurnya *Intelligence Quotient (IQ)* dan *Emotion Quality (EQ)*.

Berkaitan dengan kendala sumber daya manusia ini, berikut wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa narasumber :

“Kalau dari pihak dinas sendiri, kita sudah berupaya sekuat kita untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan keseluruhan unit dan kelompok yang ada. Kita sudah melakukannya secara berkelanjutan dan berkala, namun tentunya perlu dipahami bahwa berkala yang dimaksudkan kami tidak dapat memenuhi secara konsisten. Tentunya ini akan berkaitan dengan anggaran yang tersedia di SKPD kami. Sebenarnya komunikasi yang kami lakukan termasuk intens, hanya saja dengan materi yang terkadang dipadatkan membuat apa yang kami sampaikan sukar untuk di cerna oleh masyarakat. Bahkan beberapa materi dan bahan yang kami titipkan kepada pihak kecamatan maupun desa, itu sosialisasi yang mereka lakukan sepertinya tidak tersosialisasikan dengan baik. Untuk menilai itu, kami melihat dengan masih ramainya beberapa kelompok yang datang kepada kami untuk meminta penjelasan ulang atau memohon klarifikasi berkaitan dengan apa yang kami sampaikan.(Wawancara: Kasi Pengembangan Objek Wisata; Mukhtariyadi)

Sumber daya Manusia dari pemerintah sendiri saat ini sudah berupaya keras untuk melakukan pembinaan dan

pemberdayaan keseluruhan unit kelompok desa yang ada, komunikasi yang dilakukan pun sudah cukup intens hanya saja materi yang di padatkan susah untuk di terima oleh masyarakat. Bahkan beberapa materi dan bahan yang kami titipkan kepada pihak kecamatan maupun desa, sosialisasi yang di lakukan sepertinya tidak tersosialisasi dengan baik, karena masih ada beberapa kelompok yang datang untuk meminta penjelasan ulang berkaitan dengan apa yang disampaikan pemerintah.

Hal ini terlihat jelas karena beberapa informan menjawab hal yang sama dari hasil pemaparan wawancara. Berikut wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan.

“Kami sadari memang, bahwa kami harus nanya berulang-ulang dengan pengurus. Sebab kadang ape yang disampaikan bapak-bapak dinas tu kami tak paham. Bahase die tu kadang akan tinggi, kami tak tau arti. Makenye kengkadang kawan-kawan malas nak ikut. Paling nanti kalau dah habis acara pas jumpe atau berbual barulah nanye. Maklumlah dek... bapak-bapak tu orang hebat, kuliah die tinggi dan jauh. Sedang kami ni, banyak yang tamat SMP dan SMA je... (Wawancara : Bpk Suharman)

“Hahah... Macam nak mampos ibuk mahami bahase orang tu dek... Belum lagi mate ngantok... ingat lauk laki belum dimasak... anak nak balek sekolah. Manelah kan larat otang ni nak fokus. Paling bebual tulah yang dapat didalam ruangan tu.... (Wawancara : Ibu Sri Untari)

Dari hasil wawancara diatas bahwa tidak semua anggota kelompok pedagang pantai pesona rupa utara memahami bahasa yang disampaikan oleh dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten Bengkalis. Bahkan ada yang bertanya kembali dengan pendamping desa atau anggota lain dari kelompok pedagang pantai pesona rupa utara.

Karakter Diri

Karakter Diri adalah tabiat atau kebiasaan. karakter diri adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan

tindakan seorang individu. Karena itu, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. Dilihat dari sudut pengertian, ternyata karakter dan akhlak tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Keduanya didefinisikan sebagai suatu tindakan yang terjadi tanpa ada lagi pemikiran lagi karena sudah tertanam dalam pikiran, dan dengan kata lain, keduanya dapat disebut dengan kebiasaan.

Berkaitan dengan kendala Karakter Diri ini, berikut wawancara yang peneliti lakukan dengan Pendamping Desa:

“Kendala yang kami hadapi dalam menghadapi masyarakat ni adalah bingal alias teking. Dah kita beri tahu kadang tidak diindahkannya, terus pas ketemu masalah kita pula yang dikejar-kejanya. Maklum lah dek terkadang kita ni karakter orangnya sok pandai, begitu diminta pertanggung jawabannya, baru ketahuan. Ya.... Saya pikir dimana-mana ada karakter orang seperti ini. (Wawancara : Ketua Pendamping Desa ; Ismail Marzuki M.Soc.Sc.)

Dari pemaparan bapak Ismail di atas ada beberapa kendala yang sering dihadapinya salah satunya sering ditanyai berulang-ulang kali oleh anggota kelompok pedagang pantai Pesona Rupa Utara. Hal ini karena ada beberapa anggota kelompok yang jarang mendengarkan intruksi yang sering dikatakan oleh pemerintah.

Tidak hanya itu masih banyak anggota kelompok yang belum bisa menjaga tutur kata atau etika dalam berkomunikasi sampai saat ini. Salah satunya dari pemaparan ibu jaminah tentang karakter dirinya yang terkadang masih banyak membuat kesalahan. Berikut pemaparannya:

“Hahaaa... ntah karakter ntah kebiasaan... ntah bawaan lahir. Kadang-kadang mulut ni susah nak dijage dek. Macam hari tu, ibuk tak sengaje, ibuk kan latah gegare budak main merecon tu tesebut pulak bende tu, habis tu orang beli kat kedai ibuk pun lain memandang ibuk, pun satu lagi kan wid, ibuk ni tebilang cuek lah

orangnye jadi agak susah nak layan orang.(Wawancara : Ibu Jaminah)

Dari hasil wawancara di atas terlihat kesalahan yang dilakukan oleh ibu jaminah, seorang yang latah (seseorang yang tekejut dan cenderung mengulang-ulang kata/kalimat.) disini diperlukannya pengetahuan tentang tutur kata yang baik, berkomunikasi yang baik untuk melayani pelanggan dengan ramah, serta sopan santun melayani pelanggan. Selayaknya sebagai seorang pedagang tutur kata yang baik adalah hal utama yang diharuskan bagi setiap pedagang untuk menarik pelanggan.

Emosional

Merupakan reaksi pribadi seseorang terhadap sesuatu (objek), berbeda dengan sifat. Contoh emosi adalah senang, marah, gembira, tertawa, menangis, atau takut. Berbeda dengan suasana hati, suasana hati tidak diarahkan pada suatu objek. Emosi bisa berubah menjadi suasana hati, ketika kita kehilangan fokus pada suatu objek. Istilah yang memiliki kaitan erat dengan emosi adalah: *Affect* (pengaruh), *Emotions* (emosi), *Moods* (suasana hati). Pengaruh istilah yang mencakup berbagai perasaan oleh orang-orang yang pernah mengalami suatu peristiwa. Perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Suasana hati perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan kurang mungkin dipicu oleh stimulus atau peristiwa tertentu. Perasaan yang dirasakan oleh seorang individu sering kali berbeda dengan emosi yang ia tunjukkan, sehingga dapat menciptakan suatu dilema yang besar bagi seseorang, jika ini terjadi maka akan mengakibatkan seseorang tidak dapat menjadi orang yang ramah bagi lingkungan disekitarnya.

Berkaitan dengan kendala emosional ini, berikut wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber:

“Kami menilai, jarak emosional antara kami dengan masyarakat memberi peluang untuk terjadinya *miss* ketika kami menyampaikan materi. Meski kami sudah berupaya untuk bisa memasyarakat, terkadang masyarakat masih merasa minder dan ketika dialog atau diskusi kami lakukan sangat sedikit sekali yang mampu melakukannya (Wawancara : Kasi Promosi Objek Wisata; Dra. Umi Suryani)

Dari pemaparan hasil wawancara di atas bahwa masih sering terjadi *miss* komunikasi antara Disbudparpora dengan KP3RU ketika menyampaikan materi namun anggota kelompok masih sering enggan untuk bertanya, dan melakukan dialog atau diskusi.

Hasil Pembahasan

Mengacu kepada hasil penelitian diatas, maka ada beberapa bahasan menarik yang dapat peneliti sampaikan kepada pembaca. Perlu disampaikan bahwa pembahasan dilakukan akan berfokus pada bagaimana komunikasi pemberdayaan yang terjadi, dengan berpandu pada model komunikasi pemberdayaan

Komunikasi Pemberdayaan

Mengacu pada hasil wawancara pada ketujuh indikator yang tersedia, konsep komunikasi pemberdayaan telah dilaksanakan secara baik. Palsnya ke – tujuh indikator tersebut telah dipenuhi dan mendapat respon positif dari masyarakat atau anggota kelompok.

Hal ini memberikan kita pada sebuah referensi bahwa upaya-upaya pemberdayaan telah terpenuhi. Ini ditandai dengan hasil wawancara yang ada, dimana Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, secara bersama dengan pemerintah kecamatan, desa dan pendamping desa telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan yang dimaksudkan (lihat hal. 29 – 30). Upaya tersebut semua mereka representasikan dalam setiap kegiatan sosialisasi, pembinaan, hingga pada tahap pelatihan misalnya Proses penyadaran Masyarakat akan arti penting KP3RU sebagai salah satu projek masyarakat Sadar Wisata oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kemudian upaya memotivasi masyarakat agar masyarakat segera menyatakan keikutsertaan serta menjalankan KP3RU ini secara sungguh-sungguh. Kemudian upaya memperkuat potensi yang ada dengan melakukan pelatihan-pelatihan secara berkali baik dari

sisi pengelolaan. Mulai dari sistem tata kelola kelompok, unit usaha kelompok, administrasi, keuangan hingga sistem tata kelola pelaporan. Dan yang paling mendapat respon baik, menurut hasil wawancara adalah upaya pendampingan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Meskipun berlaku kontradiksi dalam pernyataan yang ada antara pihak dinas terkait dan masyarakat (anggota) namun masyarakat masih menganggapnya telah mendapatkan pendamping yang maksimal. Mengingat pendampingan yang dilakukan bukan hanya bersumber dari dinas, tetapi juga perangkat desa beserta unsurnya.

Partisipasi Masyarakat

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, mengacu pada fakta lapangan yang peneliti temukan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang ada, partisipasi masyarakat tergolong partisipasi aktif atau positif. Dikatakan demikian karena sesuai pernyataan pihak dinas, pendamping desa dan masyarakat bahwa penerimaan pesan komunikasi dari kegiatan sosialisasi, pembinaan, pendampingan hingga pelatihan mengalami kesulitan akan tetapi partisipasi masyarakat tetap baik.

Ditandai dengan *pertama*, keikutsertaan masyarakat dalam program ini semakin meningkat di setiap tahunnya. Sehingga menyebabkan pengurus kerepotan dalam memnuhi permintaan masyarakat untuk bisa terlibat aktif dalam program yang dimaksud. *Kedua*, kemampuan bertahan masyarakat yang ikut dalam program ini menunjukkan waktu yang tidak sebentar. *Ketiga*, meningkatnya pendapatan serta pengakuan masyarakat akan bertambahnya pengetahuan akan sistem tata kelola yang disuguhkan. Mengapa kondisi diatas dapat terjadi ?

Partisipasi yang dicerminkan masyarakat melalui hasil wawancara peneliti, menunjukkan bahwa apa yang

dilakukan oleh masyarakat tanpa paksaan. Misalnya masyarakat bersedia secara pribadi untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan KP3RU meskipun sebenarnya peruntukan kegiatan adalah pengurus. Dalam hal penetapan aturan dan norma, kesepakatan dilakukan secara bersama dengan melakukan upaya modifikasi dari ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan didalam kelompok juga telah dilakukan pembagian tugas dan wewenang berdasarkan kedudukan dan fungsi yang ada didalam struktur kepengurusan. Dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, masyarakat menjalankan berdasarkan wewenangnya masing-masing.

Kendala Yang dihadapi

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi menurut pandangan peneliti sebenarnya bukanlah persoalan yang mengkhawatirkan. Dan kendala-kendala yang muncul merupakan kendala yang kerap ditemui ketika sebuah program diterjunkan kemasyarakatan. Karena menjadi sesuatu yang lumrah ketika berkaitan potensi sumber daya manusia disebuah desa ataupun kampung menjadi isu hangat. Dan ini sebenarnya tidak bisa kita pungkiri bahwa sememangnya terjadi ketimpangan antara sumber daya manusia di kota dan di desa, apalagi berkaitan dengan pengetahuan.

Kemudian persoalan ini akan mempengaruhi bagaimana pengelolaan pesan yang diterima dalam diri masyarakat. Pesan hanya akan mampu diserap dan dimaknai secara sama apabila antara komunikator dan komunikan memiliki kesamaan. Sedangkan dinamika yang terjadi adalah berlakunya ketimpangan pengetahuan tadi.

Terakhir, berkaitan dengan karakter diri masyarakat ini lebih disebabkan adalah faktor pengalaman hidup dan cara pandang hidup seseorang. Biasanya seseorang bisa menerima hal-hal baru dari

orang baru bukanlah perkara yang mudah. Apalagi yang menjadi tolak ukur adalah masa hidup atau usia. Dan sudah menjadi kebiasaan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak mau dipandang tidak mampu oleh segelintir masyarakat lainnya. Sehingga kondisi ini menyebabkan pesan yang disampaikan oleh komunikator akan ditolak oleh komunikan. Apalagi komunikator dalam posisi ini tidak mampu membangun simpati komunikan. Maka hambatan komunikasi atau gangguan komunikasi akan mengalami kesenjangan baik dalam penyampaian ataupun penerimaan pesan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi.(2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta:PT. Bumi Aksara
- Burke, Peter. (2004). *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Cangara., Hafied. 2003. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta
- Dahl, Robert A., *Berbagai Pola Oposisi dalam Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: PT. Gramedia, 1982.
- Dilla, S. 2007. *Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu*. Bandung. Simbiosis.
- Husein Umar. 2003. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mefalopulos, P. 2008. *Pengantar Komunikasi Pembangunan. Bingkai Komunikasi*. Penerjemah: Sastrawan Manullang, Nurul
- Morissan. 2012. *Periklanan ; Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, Mulia,. 1994. *Manajemen Personalis*. Jakarta. Djambatan.
- Parwoto. 1997. *Pembangunan Partisipatif, Makalah pada Lokakarya Penerapan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Permukiman*. BKPAN. Jakarta
- Rahmat, Kriyantono 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta, PT Kencana
- Riduwan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Cetakan Pertama. Bandung : Alfabeta.
- Riko Prima, Daniel M. Rosyid, Hasan Ikhwan. 2012. *Analisa Kebijakan Pengembangan Potensi Pariwisata Kawasan Pesisir Kabupaten Bengkalis dengan Model Dinamika Sistem.Artikel.Institus Teknologi Surabaya*.
- Sugiyono, *metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung..
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia. Jakarta
- Yakin, dan M. Nursyahid. *Pustaka Pelajar*.